

ANALISIS UPAYA INDONESIA DALAM MELAWAN *BLACK CAMPAIGN* MINYAK KELAPA SAWIT DARI UNI EROPA

THE ANALYSIS OF INDONESIA'S EFFORTS IN COMBATING THE BLACK CAMPAIGN AGAINST PALM OIL FROM THE EUROPEAN UNION

Caren Riady¹, Kholif Badarul², Helen Hi³
¹²³Universitas Tanjungpura

Surel: -

Abstract

This article aims to explain Indonesia's efforts in combating the black campaign against palm oil from the European Union. Globalization is an era that encourages every sector to be interconnected with one another. Of course, this phenomenon also encourages the rapid development of certain sectors such as international trade. As a response to this situation, Indonesia, which has potential in its natural resources, taking advantage of this opportunity to become one of the main exporters of palm oil in the world. However, the issue of environmental damage and human rights violations had become the main obstacle that prompted the European Union to take firm steps to follow up on this issue. Although there have been concrete steps from the palm oil industry to create a system that is more sustainable than before, the impact has been quite influential on the share of Indonesian CPO in the European market. Therefore, this paper will explore more deeply about Indonesia's efforts to fight these stereotypes. The data collection technique is in the form of a literature study method, which is to examine several literary works such as books, journals, and articles that are considered relevant to the research topic both found online and offline. From the results found to date, Indonesia has made a series of concrete efforts ranging from policies, and diplomacy, to legal actions.

Keywords: *Black Campaign, Palm Oil, European Union*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam melawan *black campaign* terhadap minyak kelapa sawit dari Uni Eropa. Globalisasi merupakan era yang mendorong setiap sektor untuk saling berkaitan antar satu sama lain. Tentunya fenomena ini turut mendorong pesatnya perkembangan sektor-sektor tertentu seperti perdagangan internasional. Dalam menanggapi situasi tersebut, Indonesia yang memiliki potensi di sumber daya alamnya tentu saja memanfaatkan kesempatan tersebut hingga menjadi salah satu pengekspor minyak kelapa sawit utama di dunia. Akan tetapi, isu mengenai kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM sempat menjadi kendala utama yang mendorong Uni Eropa untuk melakukan langkah tegas untuk menindaklanjuti hal tersebut. Meskipun sudah ada langkah konkrit dari industri kelapa sawit untuk membuat sistem yang lebih berkelanjutan dari sebelumnya, dampak yang ditimbulkan sudah cukup berpengaruh pada pangsa CPO Indonesia di pasar Eropa. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengupas lebih dalam terkait upaya Indonesia untuk melawan stereotipe tersebut. Adapun teknik pengumpulan data berupa metode studi pustaka, yaitu melakukan penelaahan terhadap beberapa karya literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang dianggap relevan dengan topik penelitian baik yang ditemukan secara online maupun offline. Dari hasil yang ditemukan untuk saat ini, Indonesia telah melakukan serangkaian upaya konkrit mulai dari kebijakan, diplomasi, hingga jalur hukum.

Kata Kunci: *Black Campaign, Minyak Kelapa Sawit, Uni Eropa*
FISIP Universitas Tanjungpura
Riady, dkk hal 53 - 67

copyright JURMAFIS



Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol.28. No.1, bulan Juni, tahun 2023
P-ISSN: 2442-3424; E-ISSN: 2775-7501
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/index>

Diajukan: 20 Mei 2023

Direvisi: 29 Mei 2023

Diterima: 08 Juni 2023

Sitasi: -

Pendahuluan

Era globalisasi berpengaruh pada berbagai aspek termasuk perdagangan. Globalisasi dalam perdagangan internasional merupakan suatu proses yang mencakup ke berbagai sektor, yakni negara-negara yang ada di seluruh dunia menjadi sebuah himpunan kekuatan pasar yang terintegrasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial dari suatu negara. Bentuk globalisasi dalam perdagangan terlihat dari semakin maraknya kegiatan ekspor-impor di berbagai negara. Penyebabnya adalah karena tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Salah satu bentuk kegiatan ekspor-impor adalah negara Indonesia yang mengekspor minyak kelapa sawit mentah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai produsen dan pengeksportir utama minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) ke berbagai negara di dunia. Industri kelapa sawit sendiri mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak 20 tahun terakhir akibat tingginya permintaan global terhadap minyak kelapa sawit. Karena selain murah juga serbaguna sehingga perkembangannya dapat menyaingi bahkan mengalahkan minyak nabati lainnya. Hal ini berimplikasi pada semakin meluasnya budidaya kelapa sawit baik dari perusahaan kecil maupun besar di Indonesia.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada tahun 1980 produksi CPO Indonesia yang awalnya hanya sebesar 700 ribu ton mengalami peningkatan secara signifikan hingga pada 2016 produksi CPO sudah mencapai 33,5 juta ton. Pada tahun 2016 juga, Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia mengalahkan Malaysia. Di samping itu, keberhasilan produksi minyak sawit Indonesia berhasil menggeser minyak kedelai yang pada saat itu merajai pasar minyak nabati global. Sebesar 75% produksi minyak sawit diekspor dan selebihnya digunakan untuk pasar domestik. Negara tujuan utama ekspor produk kelapa sawit Indonesia adalah Uni Eropa (Belanda, Italia, Jerman dan, Spanyol), India dan China. Sejak tahun 1990 penggunaan minyak kelapa sawit di Uni Eropa terus meningkat dan pada tahun 2016 saja penjualan minyak kelapa sawit mentah Indonesia ke Uni Eropa mencapai 1.500.000 ton matrik. Akan tetapi, harga CPO mulai turun sejak Uni Eropa mulai aktif melakukan kampanye negatif terhadap kelapa sawit yang berimbas kepada industri kelapa sawit, salah satunya di Indonesia terutama pada perusahaan-perusahaan kecil milik rakyat. Dilanjutkan pada tahun 2018 berdasarkan laporan Statistik perkebunan Indonesia tentang kepala sawit yang dirilis Direktorat Jendral Perkebunan, telah tercatat bahwa volume produksi tahun 2018 meningkat secara signifikan sebesar 43,9 Juta ton atau 19,36 persen dibanding tahun 2017.

Berbicara tentang *black campaign* (kampanye negatif), secara umum definisinya dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang diungkapkan dan biasanya merupakan rumor yang bersifat menghasut, mempengaruhi, menyindir, dan merusak yang disebar untuk mempengaruhi perspektif orang-orang ke arah negatif terhadap apa yang dikampanyekan. Thomas Pureklolon (2016) menuliskan dalam bukunya yang berjudul "Komunikasi Politik" bahwa *black campaign* merupakan "kampanye yang menggunakan pesan untuk membuat citra kandidat lain tampak buruk", kampanye ini memiliki tujuan untuk membuat seseorang atau sesuatu tampak buruk melalui pesan-pesan yang diungkapkan yang kemudian menimbulkan fenomena resensi yang mempengaruhi preferensi calon pembeli atau pemilih.

Isu negatif terhadap kelapa sawit dimulai sejak tahun 1980-an yang dimulai dengan minyak kelapa sawit dianggap mengandung kadar kolesterol yang tinggi dan berbahaya bagi

kesehatan. Pada tahun 1999-2000 ketika persoalan lingkungan dan *global warming* mulai digencarkan, isu negatif mengenai kelapa sawit juga mulai bermunculan, yaitu menyangkut penggundulan hutan hujan tropis (deforestasi) yang kemudian dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit dinilai paling banyak melakukan deforestasi dengan membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan emisi karbon dan mempengaruhi perubahan iklim. Selain isu pemanasan global, perkebunan kelapa sawit juga dituding dapat mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna dan salah satunya yang paling disayangkan yaitu orang utan.¹ Dengan alasan tersebutlah, Uni Eropa mulai membatasi masuknya kelapa sawit ke kawasan mereka, dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 ketika Parlemen Uni Eropa menerbitkan "*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*" dan pelarangan biodiesel dari kelapa sawit karena mereka beranggapan bahwa industri kelapa sawit menciptakan banyak masalah seperti deforestasi hutan, merusak keanekaragaman satwa liar, pekerja di bawah umur, perusahaan ilegal, korupsi, dan pelanggaran HAM. Salah satu perwujudan resolusi tersebut yaitu meminimalisir penggunaan minyak kelapa sawit dimulai sejak tahun 2017 yang diharapkan akan benar-benar berhenti pada tahun 2030. Alternatif yang diberikan selain penggunaan *palm oil* yaitu dengan menggunakan *soybean oil*, *sunflower oil*, atau *rapeseed oil* yang dianggap lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit.

Berawal dari keinginan pasar konsumen Uni Eropa yang menginginkan produk yang dalam produksinya tidak mengandung unsur pelanggaran HAM dan ramah lingkungan, maka Uni Eropa menuntut minyak kelapa sawit harus mendapatkan CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*) yang sesuai standar RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). Meski CSPO Indonesia telah mencapai 7.8 juta ton dari 195 pabrik kelapa sawit dan luas lahan kelapa sawit bersertifikat RSPO mencapai 1.9 juta Hektare pada juni 2019 tanpa memperhitungkan lahan petani swadaya. Akan tetapi efek *black campaign* terhadap CPO masih sangat terasa terutama jika dilihat dari harga CPO yang semakin hari semakin turun. Terutama ketika produksi dan pasokan kelapa sawit sangat melimpah akan tetapi permintaan konsumen semakin rendah. Hal ini menyebabkan berbagai perusahaan mengurangi kegiatan produksi dan perawatan tanaman yang berimplikasi kepada pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam perekonomian negara, kelapa sawit merupakan sumber devisa yang sangat strategis untuk menopang perekonomian nasional hal ini telah disampaikan sendiri oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada pembukaan *Indonesian Palm oil Conference and 2016 Price Outlook* (IPOC) yang mengatakan "Sawit merupakan kekuatan bagi negara karena berfungsi sebagai bahan pangan dan energi. Selain itu kelapa sawit secara ekonomi memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara dan memberikan penghidupan bagi masyarakat". Adanya hambatan non-tarif dari salah satu pengimpor terbesar CPO yaitu Uni Eropa menyebabkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia.

Dari segi ekonomi politik, kampanye negatif terhadap kelapa sawit dianggap sebagai perjuangan untuk mendapatkan kue ekonomi dari *demand* terhadap minyak nabati yang semakin tinggi. Produktivitas lahan kelapa sawit yang lebih unggul dan perkembangan minyak kelapa sawit yang kian pesat di pasar global semakin memberikan tekanan terhadap komoditas minyak nabati lainnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artikel ini memaparkan mengenai bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengelola produk kelapa sawitnya dan memaparkan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Black Campaign Palm Oil oleh Uni Eropa. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, yaitu melakukan penelaahan terhadap beberapa karya literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang dianggap relevan dengan topik penelitian baik yang ditemukan secara online maupun offline. Miles dan Huberman berpendapat bahwa terdapat tiga langkah dalam penelitian melalui pendekatan deskriptif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2011). Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, kemudian peneliti mereduksi data dengan memilih, meringkas, dan memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data tersebut disajikan sebagai teks naratif agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setelah itu, data akan dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dituliskan di bagian pendahuluan yaitu teori dependensi dan konsep soft power. Terakhir peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

Hasil dan Diskusi

Ketika melihat perilaku Indonesia yang berusaha untuk melawan *black campaign* terhadap CPO yang kini sedang terjadi di kawasan Uni Eropa, tentunya terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Salah satunya adalah karena negara Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan dengan Uni Eropa. Jika dilihat dari definisinya, dependensi adalah “suatu kondisi historis yang membentuk struktur ekonomi dunia tertentu sehingga menguntungkan beberapa negara sehingga merugikan negara lain dan membatasi kemungkinan pengembangan ekonomi bawahan ... sebuah situasi ketika perekonomian suatu kelompok negara tertentu dikondisikan oleh pengembangan dan perluasan perekonomian lain, yang mana mereka sendiri menjadi sasaran” (Theotonio Dos Santos dalam Vincent Ferraro, 2008).

Pada nyatanya hal ini pun juga terjadi hingga saat ini, yakni ketika melihat relasi antar negara melalui kajian ekonomi politik internasional, dapat ditemukannya pembagian antara negara Utara-Selatan. Istilah Utara-Selatan sendiri muncul karena adanya ketimpangan yang signifikan antara negara yang berada di kawasan utara dengan yang ada di kawasan selatan, yang mana negara di kawasan utara cenderung dikategorikan sebagai negara maju sementara negara di kawasan selatan dianggap sebagai negara berkembang. Tentunya hal ini juga dilatarbelakangi oleh sejarah imperialisme yang dulunya dilakukan oleh Eropa Barat ke negara jajahannya sehingga memberikan mereka *advantage* terlebih dahulu. Meskipun pada akhirnya beberapa negara di Asia mampu menjadi kekuatan ekonomi baru seperti China, Jepang, Korea Selatan. Akan tetapi, hal ini tetap tidak terlalu mengubah situasi sosio-ekonomi dunia karena masih terjadinya ketimpangan yang pesat antara negara-negara Utara dengan Selatan.

Adapun dalam mengkategorikan ketergantungan dalam sistem internasional, negara terbagi menjadi 2 bentuk yang dalam penyebutan istilahnya memiliki berbagai variasi dan

salah satunya adalah center dan periphery. Ketika melihat kategori tersebut dengan kasus black campaign CPO yang diangkat oleh penulis, tentunya dua aktor utama yang terlibat—Uni Eropa dan Indonesia—dalam kasus tersebut termasuk ke dalam pembagiannya, yakni Uni Eropa dikategorikan sebagai negara center karena menunjukkan karakteristik negara yang mengimpor bahan mentah dari negara yang dependen untuk menghasilkan barang produksi yang akan dijual kembali ke negara dependen. Hal ini bisa dilihat dari data yang dilansir oleh Trading Economics (2020) dari tahun 2010-2019 terkait impor Uni Eropa dari Indonesia, yang dalam penjabarannya ditemukan bahwa pada tahun 2019 produk yang paling banyak diimpor Uni Eropa adalah komoditas lemak dan minyak hewani/nabati sebesar 2,47 miliar dolar AS. Produk-produk yang sudah diimpor ini nantinya akan digunakan untuk memproduksi barang industri lainnya seperti halnya dengan produk CPO yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel Uni Eropa.

Sementara posisi negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara periphery karena menunjukkan karakteristik negara dependen yang memasok sumber daya alamnya secara murah ke negara core. Hal ini bisa dilihat dari tindakan Indonesia yang mengandalkan ekspor bahan mentah ke negara lain selama bertahun-tahun. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Perdagangan, dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir tepatnya dari tahun 2015-2019, ekspor Indonesia didominasi oleh bahan-bahan mentah seperti komoditas lemak dan minyak hewani/nabati dan bahan bakar mineral. Ini artinya hubungan Uni Eropa dan Indonesia sendiri memiliki unsur ketergantungan karena Uni Eropa membutuhkan bahan mentah yang dimiliki oleh Indonesia sementara Indonesia melakukan ekspor bahan mentah karena belum memiliki kapabilitas untuk memproduksi bahan mentah tersebut.

Dalam teori dependensi juga dijelaskan bahwa rangkaian interaksi yang dilakukan antara negara center dan periphery akan menyebabkan perekonomian negara-negara dependen berorientasi ke arah luar. Meskipun nantinya bahan yang diekspor akan mengalir kembali dalam bentuk uang, barang, dan jasa ke negara dependen, seringkali dalam penerapannya pengalokasikan sumber daya ditentukan menurut kepentingan negara-negara core bukan kepentingan negara yang dependen. Situasi tersebutlah yang saat ini juga dialami oleh negara Indonesia, yakni ketika Uni Eropa menganggap bahwa dirinya sudah tidak membutuhkan produk kelapa sawit lagi karena dinilai tidak ramah lingkungan sehingga secara sepihak memutuskan untuk membuat kebijakan Renewable Energy Directives (RED II) yang secara tidak langsung akan mengeluarkan minyak kelapa sawit dari pasar Uni Eropa.

Maka tidak mengherankan jika pihak Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pasar CPOnya di Uni Eropa. Hal ini dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa secara tidak langsung Indonesia masih ‘bergantung’ pada Uni Eropa mengingat pasar Uni Eropa merupakan salah satu pasar terbesar bagi CPO Indonesia dan tidak mudah untuk mencari pasar lain yang mampu menggantikan posisi Uni Eropa dalam waktu singkat berhubung kebijakan RED II akan mulai diterapkan pada tahun 2020 sampai 2030. Di sisi lain, ketika melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak Indonesia untuk melawan black campaign tersebut, salah satu strategi yang paling menonjol ialah diplomasi kelapa

sawit yang dilakukan oleh Indonesia ke negara-negara lain melalui berbagai forum internasional serta melakukan kerjasama dengan KBRI asing. Aksi Indonesia jika dianalisis dalam pandangan hubungan internasional juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengerahkan soft power-nya demi meng-influence opini dunia internasional terkait CPO. Seperti yang kita ketahui, diplomasi merupakan salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh pemerintah nasional untuk meraih soft power. Jika diplomasi yang sudah dilakukan mampu menarik minat masyarakat internasional maka soft power yang diharapkan akan tercapai alias sudah berhasil. Sehingga hal inilah yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu meningkatkan citra CPO sekaligus memperkenalkan produk kelapa sawit Indonesia.

Sementara jika dilihat dari dampaknya, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia kerap mengalami kelesuan setelah adanya isu miring “black campaign.” Hal ini diakibatkan oleh regulasi di kawasan Uni Eropa yang menghambat masuknya minyak kelapa sawit asal Indonesia terhadap penolakannya terhadap produk minyak nabati non kedelai ini dianggap sebagai penyumbang terbesar deforestasi hutan lindung yang ada di pulau Kalimantan. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis Indonesia dalam mengelola produk kelapa sawitnya adalah melalui program B30. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berharap program B30 dari pemerintah dapat meningkatkan serapan produk olahan minyak sawit mereka untuk pasar dalam negeri. Melihat dinamika pasar global yang terus bergejolak terutama sentimen regulasi dari negara tujuan ekspor, pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera mengakselerasi implementasi B30 ini setelah uji coba kendaraan selesai dilakukan nantinya. Demikian juga dengan PLN, diharapkan dapat segera merealisasikan penggunaan minyak sawit untuk pembangkit listrik secara massal. Jika program penyerapan dalam negeri kita sudah dapat berjalan maksimal (B30 sekitar 9 juta ton dan PLN sekitar 3 juta ton), diharapkan dapat mengurangi dampak kelebihan stok minyak. Program B30 pada saat yang sama juga dapat mengurangi impor minyak bumi Indonesia, sehingga bisa menghemat devisa negara. (kumparan.com)

Percepatan terhadap program B30 ini sangat diperlukan terutama di saat stok minyak sawit Malaysia juga cukup tinggi sehingga industri sawit sangat mengharapkan serapan produksi dalam negeri untuk mengimbangi kelesuan pasar ekspor. GAPKI mengatakan bahwa penyerapan biodiesel dalam negeri sepanjang April 2019 hanya mencapai 516 ribu ton atau tergerus 2 persen dibandingkan pada bulan Maret. Pada Mei 2019, serapan minyak sawit domestik menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sekitar 557 ribu ton atau turun 8 persen dibandingkan bulan April. Sementara itu harga sawit CPO CIF Rotterdam sepanjang Mei 2019 bergerak di kisaran USD 492,5 – USD 535 per metrik ton, dengan harga rata-rata USD 511,9 per metrik ton. Produksi minyak sawit pada April dan Mei menunjukkan tren kenaikan. Produksi April mencapai 4,64 juta ton dan Mei 4,73 juta ton. Faktor cuaca yang masih baik telah mendorong kenaikan produksi. Sementara stok minyak kelapa sawit Indonesia mulai menumpuk. Sampai pada Mei, stok bertengger di 3,53 juta ton atau naik 11 persen dibandingkan dengan stock April sebesar 3,18 juta ton.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB), yang mana dalam dokumen tersebut telah tertera jelas mengenai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

perkebun; penyelesaian status dan legalisasi lahan; pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan; serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Secara tidak langsung, dengan adanya aturan yang disahkan pada tanggal 22 November 2019 ini juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang mendukung kelancaran program Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mana pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program tersebut pada tahun 2011. Program ini mewajibkan para petani kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi yang seleksinya berbasis ketentuan standar internasional dari International Standard Organization (ISO). Tujuan dari kebijakan ISPO selain untuk meningkatkan daya saing CPO Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan internasional mengenai pembangunan perkebunan berkelanjutan sehingga produk yang dihasilkan diharapkan bisa ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, proses sertifikasi ISPO ini harus melewati beberapa persyaratan dan prosedur yang ketat dan salah satunya adalah aspek legalitasnya seperti aspek lahan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dikarenakan aspek-aspek ini dianggap krusial dalam proses sertifikasinya, jikalau perusahaan kedapatan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka konsekuensinya perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi. Selain itu, ISPO juga menekankan pada legalitas lahan yang digunakan untuk menanam kelapa sawit. Karena jika syarat ini tidak dapat dipenuhi maka produk institusinya akan langsung dikategorikan sebagai non-sustainable. Sejauh ini, dari data yang terlampir hingga bulan Januari 2020, sertifikat ISPO telah menerbitkan sebanyak 621 unit kepada 607 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan 4 Koperasi Unit Desa (KUD) plasma. Namun, jumlah ini masih belum bisa dibilang memuaskan karena masih sebagian besar perusahaan sawit belum memenuhi standarisasi dari ISPO. Hal ini bisa dilihat dari data yang tercantum di Sekretariat ISPO Ditjenbun per November 2018 yang mana telah terdaftar 2.528 perusahaan sawit.

Meskipun begitu, langkah pemerintah Indonesia dalam menerapkan standar pembangunan berkelanjutan terhadap perusahaan sawit di Indonesia sudah bisa dikatakan menuju arah yang lebih baik karena sudah memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan dalam langkah panjang. Dan dengan adanya program ISPO ini, Indonesia juga dapat memanfaatkan fakta yang ada sebagai alat diplomasi ekonomi Indonesia untuk menekan black campaign yang sedang marak di kawasan eropa karena data-data yang dikumpulkan selama proses sertifikasi ISPO dapat membuktikan bahwasanya produk sawit dari Indonesia sudah terbukti ramah lingkungan dan mengikuti syarat pembangunan keberlanjutan.

Apalagi mulai dari tahun 2016, Uni Eropa mulai merancang target-target baru dalam kebijakan energi terbarukan. Dalam RED II ditetapkan bahwa target penggunaan energi terbarukan pada tahun 2030 naik menjadi 32 persen dari yang semula hanya 27 persen. Diatur pula kontribusi beberapa kategori biofuel sehingga tidak melebihi konsumsi pada tahun 2019. Kategori yang dimaksud adalah yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land-Use Change/ILUC), serta tanaman yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan. Bahkan dalam aturan tersebut disebutkan bahwa minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai bahan yang tidak berkelanjutan sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku dalam biofuel. Rencananya penggunaan minyak kelapa sawit akan dikurangi secara bertahap hingga habis

sama sekali pada tahun 2030 dan mulai diberlakukan Komisi Eropa pada Maret 2019. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia dan Malaysia, sebagai penghasil 85 persen minyak sawit dunia merasa ekspor mereka terdiskriminasi oleh Uni Eropa dalam perdagangan Internasional. Khususnya di Indonesia, industri sawit merupakan lapangan usaha bagi lebih dari 4 juta petani kecil. Saat ekspor dihambat dengan peraturan-peraturan tersebut, maka akan banyak sekali petani yang merasakan dampaknya.

Selain langkah strategis dalam pengelolaan produk CPO, pemerintah Indonesia tentu saja sudah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak dari black campaign tersebut. Jika dilihat dari data-data yang sudah penulis temukan, strategi pemerintah Indonesia secara garis besar dapat terbagi menjadi 2 jalur yaitu melalui upaya diplomasi dan jalur hukum.

Dalam upaya diplomasi, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan produk kelapa sawit Indonesia kepada negara-negara baik yang di kawasan Eropa maupun yang lainnya melalui berbagai acara seperti 'Indonesia Palm Oil Forum' yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2019, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat dan meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan AS. Forum ini juga terselenggara atas kerja sama dengan berbagai institusi seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDB-KS) bersama Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta didukung Kementerian Perdagangan. Pihak Indonesia juga sempat mempromosikan produknya dalam Internasional Conference on Oil Palm and the Environment (ICOPE) yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Bali dan dihadiri oleh sekitar 30 negara untuk membahas tentang kelapa sawit.

Adapun upaya Indonesia dalam mengkampanyekan perdagangan CPO secara adil yaitu dengan melakukan pendekatan diplomatik secara informal terhadap negara-negara yang ada di kawasan di Eropa seperti Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Belgia serta Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan di Brussel dan Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Italia di Roma, yang mana tujuan dari kunjungan diplomatik ini selain untuk berkampanye, tetapi juga untuk meraih dukungan dari negara bersangkutan.

Tidak hanya melakukan diplomasi melalui jalur informal saja, pemerintah Indonesia juga melakukan negosiasi secara formal atas isu minyak sawit melalui komitmen kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Negosiasi yang diadakan oleh IEU-CEPA ini sudah dimulai sejak tahun 2016 dan telah memasuki ronde ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 September 2017 di Brussel, Ibukota Belgia. Dalam negosiasi tersebut, isu minyak sawit dan penggundulan hutan diangkat menjadi salah satu isu yang akan dibahas karena bertepatan dengan topik negosiasi pada ronde yaitu Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga tidak lupa untuk mengungkapkan bahwa dari pihaknya sudah ada upaya untuk meningkatkan standar sertifikasi ISPO untuk memenuhi standar Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit yang berkelanjutan.

Terlebih lagi sebagai respon terhadap black campaign tersebut, Indonesia juga secara aktif menyatakan penolakannya terhadap resolusi tersebut yang salah satunya adalah negara Indonesia secara formal telah bergabung dengan negara-negara produsen minyak

kelapa sawit lainnya seperti Malaysia, Ekuador, Kolombia, dll. untuk mengirimkan Objection Letter atau surat keberatan yang ditujukan kepada Presiden Parlemen Uni Eropa dan Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, dan Keamanan Pangan Uni Eropa (ENVI) pada tahun 2017. Surat tersebut ditulis oleh beberapa duta besar yang ada di Brussels yang isinya menjelaskan tentang data-data mengenai kondisi industri minyak kelapa sawit dan pandangan negara-negara produsen yang merasa keberatan dengan Resolusi Uni Eropa yang secara spesifik melarang konsumsi minyak sawit untuk produksi biofuel di Eropa. Di dalam surat tersebut, pihak Indonesia juga tidak lupa untuk menekankan pandangannya bahwa sepertinya terdapat unsur diskriminasi terhadap perdagangan produk CPO dibalik resolusi Uni Eropa tersebut.

Di kesempatan berikutnya, isu mengenai resolusi Uni Eropa terkait CPO juga sempat diangkat dalam pertemuan menteri keempat di Jakarta pada bulan April 2017, yang mana pertemuan ini merupakan salah satu agenda kerjasama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bersama negara Malaysia untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri minyak kelapa sawit dan langkah-langkah untuk memenuhinya sehingga dapat menjamin harga pasar dan kualitas produk. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengungkapkan kekecewaannya terhadap resolusi Uni Eropa karena mereka menganggap bahwa alasan dibalik pelarangan tersebut didasarkan oleh data yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan sebagai negara yang merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, kebijakan ini tentu saja akan sangat merugikan negara-negara yang terlibat.

Bahkan pada bulan Desember 2019, pihak Indonesia juga telah memutuskan untuk melewati jalur hukum dengan secara resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) karena menilai kebijakan Renewable Energy Directives II yang ditetapkan oleh Uni Eropa merupakan tindakan diskriminatif terhadap produk CPO. Perlu diketahui juga bahwa adanya pertimbangan yang matang dari pemerintah Indonesia untuk mencapai keputusan tersebut karena mereka telah melakukan berbagai upaya untuk menerima masukan seperti melalui kajian ilmiah, melakukan konsultasi dengan semua stakeholder, hingga melakukan pertemuan dalam negeri dengan asosiasi produk CPO. Hal ini dilakukan untuk membuktikan posisi Indonesia yang tegas dalam menyuarakan keberatannya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Bisa dibayangkan peristiwa ini bukan pertama kalinya Indonesia memutuskan untuk melewati jalur hukum, sebelumnya pihak Indonesia juga sempat bersengketa dengan Uni Eropa mengenai bea masuk biodiesel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penulis terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat memaksimalkan soft power-nya untuk merespon kebijakan Uni Eropa. Mulai dari melakukan kerjasama dengan negara yang ikut dirugikan hingga melakukan diplomasi baik secara formal maupun informal terhadap negara-negara yang berada di kawasan Uni Eropa. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas produk CPO pun juga terus dilakukan melalui kebijakan RAN-KSB serta program sertifikasi ISPO. Hal ini juga sejalan dengan teori dependensi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara Indonesia secara tidak langsung masih bergantung pada pasar Uni Eropa karena ekspor Indonesia

masih didominasi oleh komoditas bahan mentah sehingga dapat menyebabkan hilangnya pemasukan negara jika produk CPO benar-benar dilarang oleh pihak Uni Eropa.

Oleh karena itu, pihak Indonesia sendiri telah mengupayakan beberapa strategi untuk mempertahankan pasar CPO di kawasan Eropa mengingat bahwasanya pasar Uni Eropa merupakan pasar minyak sawit terbesar kedua setelah India. Pada akhirnya, visi Indonesia adalah menjadi “penghasil minyak sawit terbaik dunia”, dengan target 40 juta ton minyak pada akhir 2020. Namun kecemburuan internasional terhadap perkembangan sawit Indonesia perlu didalami dengan mengurai isu negatif pembukaan lahan dimana Uni Eropa beranggapan telah terjadinya deforestasi hutan dan sawit dianggap merusak keberlangsungan hidup flora-fauna endemik. Dengan mengurai isu lahan sawit yang berkelanjutan, dapat diketahui akar masalahnya adalah di pasar dunia sawit semakin menguat dibandingkan minyak nabati lain karena efisiensi produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan produk olahan lain. Jika dilihat dalam perspektif global, sawit berperan penting dalam minyak nabati dunia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan. Khususnya untuk Indonesia, kontribusi perkebunan rakyat cukup besar. Beberapa fakta penyebab deforestasi adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, bukan dari lahan sawit. Menurut penulis, pemerintah perlu menyiapkan strategi pengembangan lahan berkelanjutan untuk menjaga pangsa sawit. Salah satunya adalah kebijakan tegas dengan menggunakan fakta dan hasil penelitian. Perlu juga adanya peningkatan advokasi dalam menghadapi isu negatif yang disudutkan oleh pihak asing terhadap produk sawit, sosialisasi dan pelatihan bercocok tanam yang mengedepankan keberlangsungan hidup flora-fauna kepada petani. Setelah beberapa langkah diterapkan maka selanjutnya pemerintah memonitoring persebaran lahan untuk mencegah terjadinya pembalakan liar hutan yang menyebabkan terancamnya satwa langka. Dalam hal diplomasi luar negeri pemerintah dapat melakukan riset ulang terkait pangsa pasar baru dalam melakukan impor sawit ke negara-negara yang berpotensi agar produksi tetap dapat berjalan.

Referensi

Artikel dan Situs Berita Online:

- Adharsyah, Taufan. "Sebabkan Defisit Parah, ini 4 Alasan Harga CPO Terjun Bebas." CNBC Indonesia. 2019. diakses 02 Mei 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190516150147-17-72967/sebabkan-defisit-parah-ini-4-alasan-harga-cpo-terjun-bebas>.
- Adharsyah, Taufan. "Tak Disangka, Gara-gara Ini Eropa Hantam Sawit RI!" CNBC Indonesia. 2019. diakses 28 April 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190822140737-4-93924/tak-disangka-gara-gara-ini-uni-eropa-hantam-sawit-ri>.
- Alika, Rizky. "Sertifikasi ISPO Capai 5,45 Juta Hektare hingga Januari 2020." Katadata. 2020. Diakses 2 Mei 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/02/14/sertifikasi-ispo-capai-545-juta-hektare-hingga-januari-2020>.
- Farn, Elisabeth. "Dependency Theory: A Useful Tool for Analyzing Global Inequalities Today?" E-International Relations. 23 November 2016. Diakses 29 Mei 2020. <https://www.e-ir.info/2016/11/23/dependency-theory-a-useful-tool-for-analyzing-global-inequalities-today/>.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. "Capaian ISPO Ukuran Kehadiran Negara." Gapki.id. 2016. Diakses 3 Mei 2020. <https://gapki.id/news/1403/capaian-ispo-ukuran-kehadiran-negara>.
- GRESNEWS.com. "83,66% Perusahaan Sawit di Indonesia Tidak Bersertifikat ISPO dan Belum Diberi Sanksi." 2 September 2019. Diakses 2 Mei 2020. http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/117037-8366-perusahaan-sawit-di-indonesia-tidak-bersertifikat-ispo-dan-belum-diberi-sanksi/.
- Indonesian Sustainable Palm Oil. "Ihwal." Ispo-org.or.id. 2013. Diakses 2 Mei 2020. http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=209&lang=ina.
- InfoSAWIT. "Dampak Isu Black Campaign di Indonesia terhadap Industri Sawit." 2019. Diakses 12 Mei 2020 <https://www.infosawit.com/news/9268/dampak-isu-black-campaign-di-indonesia-terh.adap-industri-sawit>.
- InfoSAWIT. "Ini Dia Persyaratan Sebelum Sertifikasi ISPO Sawit." 21 Mei 2018. Diakses 2 Mei 2020. <https://www.infosawit.com/news/8038/ini-dia-persyaratan-sebelum-sertifikasi-ispo-sawit>.
- InfoSAWIT. "Mendag Promosi Minyak Sawit di AS." 22 Januari 2019. Diakses 22 Mei 2020. <https://www.infosawit.com/news/8703/mendag-promosi-minyak-sawit-di-as>.
- Kadafi, Moh. "Pemerintah promosi produk kelapa sawit ke 30 negara di ICOPE 2018." Merdeka.com. 25 April 2018. Diakses 22 Mei 2020. <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-promosi-produk-kelapa-sawit-ke-30-negara-di-icope-2018.html>.
- Kementerian Perdagangan. "Perkembangan Ekspor NonMigas (Komoditi)." statistik.kemendag.go.id. 2019. Diakses 29 Mei 2020.

- <https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-export-commodity>.
- Rahayu, Eva Martha. "Sawit Memberikan Kontibusi Devisa Negara dan Penghidupan Masyarakat." SWA Online. 2015. Diakses 13 Mei 2020. <https://swa.co.id/swa/trends/management/sawit-memberikan-kontribusi-devisa-negara-dan-penghidupan-masyarakat>.
- Rahim, Silmi. "Dampak Isu Black Campaign Di Indonesia Terhadap Industri Sawit." InfoSAWIT. 7 September 2019. Diakses 30 Mei 2020. <https://www.infosawit.com/news/9268/dampak-isu-black-campaign-di-indonesia-terhadap-industri-sawit>.
- Saputro, Wendiyanto. "Ekspor Lesu, Serapan Dalam Negeri Jadi Harapan Industri Sawit." Kumparan. 15 Juli 2019. Diakses 30 Mei 2020. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ekspor-lesu-serapan-dalam-negeri-jadi-harapan-industri-sawit-1rTLatHg7Nn/full>
- Simanjuntak, Damiana. "7,8 Juta Ton CPO Indonesia Bersertifikat RSPO." Investor Daily. 2019. Diakses 13 Mei 2020. <https://investor.id/business/78-juta-ton-cpo-indonesia-bersertifikasi-rspo>.
- Siregar, Efreim Limsan. "Sawit Dikepung Kampanye Negatif, PHK Menanti." CNBC Indonesia. 2019. Diakses 13 Mei 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190927090808-17-102619/sawit-dikepung-kampanye-negatif-phk-menanti>.
- Trading Economics. "European Union imports from Indonesia." tradingeconomics.com. Mei 2020. Diakses 29 Mei 2020. <https://tradingeconomics.com/european-union/imports/indonesia>.
- Warta Ekonomi. "Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO." 15 Desember 2019. Diakses 22 Mei 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read261716/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto>.
- Widowati, Heri. "Sejarah dan Kontroversi Kampanye Anti Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa." Katadata. 2019. Diakses 12 Mei 2020 <https://katadata.co.id/berita/2019/08/26/sejarah-dan-kontroversi-kampanye-anti-minyak-sawit-uni-eropa>.

Jurnal:

- Arifin, Bustanul, and Komang Audina Permana Putri. "Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 8, no. 2 (2019): 203-223. DOI: <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.201-221.2019>.
- Dewi, Mastriati Hini Hermala. "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional." *Jurnal Ekonomia* 9, no. 1 (2019).
- Drajat, Bambang. "Upaya mengatasi black campaign kelapa sawit dan langkah strategis ke depan." Lembaga Riset Perkebunan. Jawa Barat (2013).
- Habibie, Ardyanata Billy. "Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Black Campaign Sawit Untuk Meningkatkan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Periode Tahun 2007-2012." *Global dan Policy* 4, no. 1 (2016).

Jati, Wasisto Raharjo. "Ketimpangan utara-selatan dalam globalisasi." *Jurnal Studi Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2013): 83-102.

Suhadak, Anita Dio Yonanda. "Pengaruh Black Campaign Kepala Sawit terhadap Harga Kelapa Sawit Dunia dan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 72, no. 2 (2019).

Buku:

Ferraro, V.. Dependency theory: An introduction. In S. Giorgio (Ed.), *The development economics reader* (pp. 58-64). London: Routledge, 2008.

Jackson, Robert, and Georg Sørensen. *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Pureklolon, Thomas. *Politic Communication*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.